

KISI-KISI SOAL PTS
SEJARAH INDONESIA KELAS XI MIPA & IPS
(SUMBER: BUKU MANDIRI)

Kompetensi Dasar/KD:

KD 3.1 Peristiwa Sekitar Proklamasi Indonesia

a. Kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II Indonesia

Menjelang akhir tahun 1944, Jepang mulai mengalami kekalahan dari Sekutu. Beberapa wilayah jajahannya satu per satu berhasil direbut Sekutu. Puncak kekalahan Jepang terjadi setelah Sekutu (Amerika Serikat) menjatuhkan bom atom pada dua kota utama di Jepang. Pada 6 Agustus 1945, Sekutu mengebom Kota Hiroshima. Pada 9 Agustus 1945, Sekutu mengebom Kota Nagasaki. Luluh lantaknya dua kota utama yang memiliki pabrik senjata tersebut memaksa Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Perjanjian penyerahan Jepang kepada Sekutu ditandatangani di kapal USS Missouri pada 2 September 1945 oleh perwakilan Sekutu Jenderal Douglas McArthur dan perwakilan Jepang Menteri Luar Negeri Mamoru Shigemitsu.

b. Peristiwa Rengasdengklok

Peristiwa pengeboman Hiroshima dan Nagasaki sampai juga ke telinga para aktivis pergerakan. Pada 9 Agustus, Sukarno, Moh. Hatta, dan Radjiman Wedyodiningrat terbang ke Dalat, Vietnam (Markas Besar Angkatan Bersenjata Jepang di Asia Tenggara) memenuhi panggilan Marsekal Terauchi.

Pada 10 Agustus, Sutan Syahrir mendengar dari siaran radio British Broadcasting Corporation (BBC) tentang kemungkinan Jepang akan menyerah kepada Sekutu. Dalam waktu singkat, kabar tersebut menyebar ke kalangan aktivis pergerakan baik golongan tua maupun golongan muda. Kalangan aktivis pergerakan di tanah air menjadi yakin bahwa pemanggilan ketiga tokoh ke Dalat berkaitan dengan kemungkinan menyerahnya Jepang. Hal ini meyakinkan pejuang kemerdekaan untuk segera mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Jangan sampai, Indonesia dikuasai oleh Sekutu dan dikembalikan kepada Belanda.

Keinginan untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia menimbulkan perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda. Golongan tua diwakili oleh Ir. Sukarno dan Drs. Moh. Hatta, sedangkan golongan muda oleh Sutan Syahrir. Keduanya berbeda pendapat mengenai proses pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia kelak. Golongan tua menginginkan proklamasi kemerdekaan Indonesia melalui PPKI yang dipandang sebagai lembaga yang mewakili utusan bangsa Indonesia dari berbagai daerah. Adapun golongan muda menginginkan proklamasi kemerdekaan tanpa melalui PPKI yang dianggap sebagai badan bentukan Jepang, tetapi dilaksanakan secara revolusioner.

Pertimbangan golongan tua untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan melalui PPKI adalah sebagai berikut.

- 1) Jepang belum memiliki kepastian menyerah kepada Sekutu. Meskipun sudah diketahui menyerah, Jepang harus mempertahankan status quo, yang artinya menjaga agar tidak terjadi perubahan apa pun di Hindia Belanda (Indonesia).
- 2) Jika terjadi proklamasi kemerdekaan seperti yang diinginkan pemuda, akan memancing kemarahan Jepang yang masih memiliki pasukan bersenjata lengkap di Indonesia. Hal ini akan memicu pertumpahan darah dan Indonesia yang belum memiliki pasukan ataupun persenjataan tentu akan sulit menghadapi Jepang.
- 3) Marsekal Terauchi sudah menjanjikan bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia pada 24 Agustus 1945,

Pada 15 Agustus 1945, Ir. Sukarno dan Drs. Moh. Hatta menyampaikan undangan rapat bagi para anggota PPKI tanggal 16 Agustus 1945. Sementara itu, golongan muda yang mengetahuinya juga bersiap untuk memboikot rapat PPKI. Golongan muda yang dipimpin Chairul Shaleh mengadakan rapat di Laboratorium Mikrobiologi, Pegangsaan Timur, Jakarta, dan mengambil keputusan berikut.

- 1) Mendesak Ir. Sukarno dan Drs. Moh. Hatta untuk bermusyawarah dengan golongan muda dan tidak terlibat lagi dengan pemerintah Jepang.
- 2) Mendesak Ir. Sukarno dan Drs. Moh. Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan paling lambat tanggal 16 Agustus 1945 malam.

Pada 16 Agustus 1945, dini hari, terjadilah Peristiwa Rengasdengklok. Golongan pemuda membawa Ir. Sukarno dan Drs. Moh. Hatta ke Rengasdengklok, Karawang, Jawa Barat. Tujuannya menghindari keduanya dari pengaruh Jepang dan meyakinkan kembali agar proklamasi kemerdekaan Indonesia segera dilaksanakan. Daerah Rengasdengklok dipilih karena alasan berikut.

- 1) Letaknya cukup terpencil, sekitar 15 km dari Karawang.
- 2) Terdapat markas Peta yang saling berhubungan baik antara Daidan (Batalion) Purwakarta dan Daidan Jakarta sehingga jika terjadi sesuatu akan cepat mendapat bantuan keamanan.

Ir. Sukarno dan Drs. Moh. Hatta tetap menolak keinginan golongan muda. Akhirnya, disepakati oleh kedua golongan tersebut bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia paling lambat akan dilakukan pada 17 Agustus 1945. Ahmad Subarjo menjemput kedua tokoh nasional tersebut kembali ke Jakarta untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia.

c. Perumusan Naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

Pada 16 Agustus 1945 malam, Ir. Sukarno dan Drs. Moh. Hatta kembali ke Jakarta. Laksamana Tadashi Maeda membawa keduanya ke rumah Mayor Jenderal Moichiro Yamamoto dan Mayor Jenderal Otoshi Nishimura. Keduanya menolak memberi kemerdekaan Indonesia karena Jepang harus menjaga status quo pascakekalahannya dari Sekutu. Hal ini meyakinkan keduanya bahwa janji kemerdekaan Jepang pun tidak akan pernah terwujud.

Ir. Sukarno dan Drs. Moh. Hatta kembali ke rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol I, Jakarta, untuk mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Adapun tokoh-tokoh yang terlibat dalam rapat perumusan teks proklamasi kemerdekaan adalah Ahmad Subarjo, Sukarni, Sayuti Melik, Burhanuddin Muhammad Diah, dan Sudiro.

Ir. Sukarno, Drs. Moh. Hatta, dan Ahmad Subarjo merumuskan teks proklamasi. Ir. Sukarno menyumbangkan kata Proklamasi dan (D)jakarta, 17-8-'05 Wakil-wakil bangsa Indonesia. Ahmad Subarjo menyampaikan usul kalimat kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, Drs. Moh. Hatta

menambahkan kalimat hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempoh yang sesingkat-singkatnya.

Setelah selesai, naskah ditik oleh Sayuti Melik. Ada beberapa perubahan yang dilakukan dalam teks proklamasi tersebut, yakni kata tempoh menjadi tempo, wakil bangsa Indonesia menjadi atas nama. bangsa Indonesia, (D)jakarta, 17-8-05 menjadi (D)jakarta, hari 17 boelan 8 taioen 05.

d. Pembacaan Naskah Proklamasi RI

Pada 17 Agustus 1945, suasana persiapan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan sudah mulai ramai. Proklamasi kemerdekaan Indonesia tepat dimulai pada pukul 10.00 WIB. Adapun urutan upacara proklamasi kemerdekaan dimulai dengan pembacaan teks proklamasi, pengibaran bendera Merah Putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati, dan sambutan Walikota Suwiryo serta dr. Muwardi. Pengibaran bendera dilakukan oleh Suhud dan Latief Hendraningrat.

Proklamasi kemerdekaan Indonesia memiliki makna yang besar bagi bangsa Indonesia, yaitu sebagai berikut.

- 1) Sebagai tanda lepasnya bangsa Indonesia dari penjajahan bangsa asing.
- 2) Lahirnya Negara Republik Indonesia.
- 3) Sebagai modal dalam menjalankan pemerintahan dan menjalin hubungan dengan negara lain.
- 4) Sebagai sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia pada awal berdirinya Negara Indonesia.

e. Penyebarluasan Berita Proklamasi RI

Ir. Sukarno menginginkan agar berita kemerdekaan Indonesia dapat tersebar hingga ke daerah-daerah. Beberapa hal yang dilakukan Ir. Sukarno untuk menyebarluaskan berita kemerdekaan Indonesia adalah sebagai berikut.

- 1) Meminta B.M. Diah memperbanyak teks proklamasi dan menyebarkannya secara luas kepada khalayak ramai.
- 2) Mengirimkan utusan ke berbagai daerah untuk memberitahukan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Anggota PPKI yang berasal dari daerah menyampaikan berita proklamasi kemerdekaan tersebut. Misalnya, Teuku Muhammad Hasan dari Aceh dan Ketut Pudja dari Bali.
- 3) Menyiarkan proklamasi kemerdekaan melalui siaran radio Hoso Kanri Kyoku. Setelah kantor berita Domei disegel Jepang. kelompok pemuda di bawah pimpinan Yusuf Ronodipura membuat pemancar baru dengan kode DJK 1 di Menteng 31 untuk membantu penyebaran berita proklamasi kemerdekaan Indonesia.
- 4) Menyebarkan berita proklamasi kemerdekaan melalui pamflet, poster, pengeras suara mobil di jalan-jalan, dan coretan-coretan dinding.

f. Sambutan rakyat Indonesia terhadap Proklamasi Indonesia:

1. Terbentuknya kelompok budayawan angkatan '45

Adapun nama tokoh yang menandai periode sastra Angkatan 45 adalah Chairil Anwar, Pramoedya Ananta Toer, Usmar Ismail, Ida Nasution, Utuy Tatang Sontani, Balfas, J.E. Tatengkeng, dan Asrul Sani.

2. Peristiwa tanggal 2 September 1945

Pada 2 September 1945, Komite van Aksi mengeluarkan Manifesto Rakyat No. 1 yang berisi dukungan terhadap kemerdekaan dan pemerintahan Indonesia yang baru terbentuk. Komite van Aksi terdiri atas laskar-laskar perjuangan rakyat, seperti Angkatan Pemuda Indonesia dan Barisan Buruh Indonesia.

3. Peristiwa tanggal 19 September 1945

Pada 19 September 1945, ribuan orang berkumpul di Lapangan Kuda sebagai bentuk dukungan spontan terhadap proklamasi kemerdekaan sekaligus protes atas sikap Jepang yang masih mempertahankan status quo. Aksi rakyat Indonesia tersebut mengkhawatirkan tokoh-tokoh nasionalis Indonesia karena pasukan Jepang terus

berjaga di sekeliling Lapangan Ikada. Jika rakyat dan pasukan Jepang terpicu emosi, akan terjadi bentrokan yang dapat menimbulkan banyak korban. Oleh karena itulah, Ir. Sukarno segera bergerak menuju Lapangan Ikada. Dalam pidato singkatnya yang penuh wibawa, Presiden Sukarno menekankan pentingnya mempertahankan proklamasi kemerdekaan Indonesia yang didukung oleh kepercayaan rakyat Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia yang baru terbentuk meminta agar rakyat Indonesia mematuhi kebijakan pemerintah dan meninggalkan Lapangan Ikada dengan tertib. Rapat raksasa di Lapangan Ikada menjadi pertemuan antara pemerintah Indonesia dan rakyat Indonesia secara terbuka. Peristiwa tersebut juga menunjukkan kewibawaan pemerintah pusat Indonesia yang diwakili oleh Presiden Sukarno dan kepercayaan rakyat Indonesia pada pemerintahan yang baru terbentuk.

4. Peristiwa tanggal 26 September 1945

Pada 26 September 1945, terjadi pertempuran antara Badan Keamanan Rakyat (BKR) dan pasukan Jepang. Pertempuran diawali dengan aksi pemogokan pegawai pemerintah dan perusahaan Jepang disertai tuntutan agar semua aset tersebut diserahkan kepada pemerintah Indonesia.

Selanjutnya, pasukan BKR menyerang tangsi Otsuka Butai untuk melucuti persenjataan tentara Jepang. Persenjataan diperlukan karena sebagai negara merdeka, Indonesia belum memiliki persenjataan yang lengkap selain dari hasil pelucutan tersebut. Karena Jepang telah memiliki perjanjian dengan Sekutu untuk mempertahankan status quo, pasukan Jepang pun menolak. Pertempuran antara BKR dan pasukan Jepang pun tidak dapat dihindarkan.

5. Peristiwa tanggal 6 Oktober 1945

Pada 6 Oktober 1945, pemuda di Banda Aceh membentuk Angkatan Pemuda Indonesia. Hal ini memicu kemarahan komandan pasukan Jepang yang segera memanggil para pemuda untuk membubarkan organisasi tersebut. Jepang tidak mengizinkan adanya pembentukan organisasi apa pun selama pasukan Sekutu belum datang. Para pemuda menolak hal tersebut. Sebaliknya, mereka justru menyerbu

kantor pemerintahan Jepang untuk mengambil alih dan mengibarkan bendera merah putih.

6. Peristiwa tanggal 8 Oktober 1945

Pada 8 Oktober 1945, Residen Sumatra Selatan dr. Abdul Karim Gani mengadakan upacara pengibaran bendera merah putih. Dalam upacara, Residen dr. A. K. Gani menyatakan bahwa Keresidenan Sumatra Selatan merupakan bagian dari Indonesia merdeka sehingga hanya akan mematuhi pemerintah Republik Indonesia.

7. Peristiwa tanggal 15 - 20 Oktober 1945

Pada 15-20 Oktober 1945, terjadi Pertempuran Lima Hari di Semarang antara pasukan Jepang dan para pemuda Indonesia. Pertempuran diawali ketika salah seorang tawanan Jepang melarikan diri saat akan dipindahkan dari Pabrik Gula Cepiring ke Penjara Bulu di Semarang. Tawanan tersebut meminta perlindungan batalion Kidobutai. Selanjutnya, muncul isu bahwa cadangan air minum penduduk di daerah Candi telah diracun Jepang. Kepala laboratorium, dr. Karyadi, memeriksa sumber air tersebut, tetapi kemudian ditembak pasukan Jepang. Peristiwa ini memicu kemarahan pemuda yang langsung menyerang kantor pemerintahan dan menangkap setiap orang Jepang. Serangan ini dibalas oleh pasukan Jepang. Pertempuran terjadi selama lima hari dan berakhir setelah pimpinan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) berunding dengan pasukan Jepang.

KD 3.2 Pembentukan Pemerintahan Republik Indonesia

a. Syarat-syarat berdirinya suatu negara

Terdapat syarat konstitutif dan deklaratif bagi berdirinya suatu negara.

a. Syarat konstitutif:

- 1) Memiliki wilayah,
- 2) Memiliki rakyat, dan
- 3) Memiliki pemerintahan.

b. Syarat deklaratif: Adanya pengakuan dari negara lain terhadap kemerdekaan tersebut sehingga dapat saling bekerja sama internasional.

b. Tugas-tugas PPKI

Salah satu tugas utama PPKI adalah mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Hasil sidang BPUPKI sebelumnya yang berhasil merumuskan dasar negara, pembukaan UUD, dan rancangan batang tubuh UUD 1945 kemudian ditelaah kembali dalam sidang PPKI. Hasilnya adalah perubahan dalam pembukaan UUD 1945. Salah satu alasan perubahan itu adalah kondisi masyarakat Indonesia yang majemuk. Meskipun Islam menjadi kelompok mayoritas di Indonesia, masih ada kelompok lainnya, seperti umat Nasrani, Hindu, dan Buddha. Tokoh-tokoh nasionalis yang berjuang pun beragam latar belakangnya. Oleh karena itu, demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, PPKI mengadakan perubahan dalam UUD 1945 itu.

c. Perubahan-perubahan dalam UUD 1945

Berikut perubahan dalam UUD 1945.

- a) Pergantian kata *Muqaddimah* menjadi *Pembukaan*.
- b) Kalimat *Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya* diubah menjadi kalimat *Ketuhanan Yang Maha Esa*.
- c) Kalimat *menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab* diubah menjadi *kemanusiaan yang adil dan beradab*.
- d) Pasal 6 Ayat (1) tentang persyaratan sebagai presiden Indonesia. Semula kalimatnya berbunyi *Presiden adalah orang Indonesia asli dan beragama Islam* diubah menjadi *Presiden adalah orang Indonesia asli*.

d. Sidang-Sidang PPKI

Sidang I PPKI

Sidang I PPKI diadakan tanggal 18 Agustus 1945 dan menghasilkan keputusan sebagai berikut.

- a. Mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Memilih Ir. Sukarno sebagai presiden dan Drs. Moh. Hatta sebagai wakil presiden.
- c. Presiden dalam menjalankan tugasnya akan dibantu oleh Komite Nasional Indonesia.

Sidang II PPKI

Sidang II PPKI diadakan tanggal 19 Agustus 1945 dan menghasilkan keputusan sebagai berikut.

a. Pembentukan dua belas departemen beserta para pejabat kementeriannya. Keduabelas departemen dan para menterinya adalah sebagai berikut.

- 1) Menteri Dalam Negeri : R. A. A. Wiranatkusumah
- 2) Menteri Luar Negeri : Mr. Ahmad Subarjo
- 3) Menteri Kemakmuran : Ir. D. P. Surahman
- 4) Menteri Sosial : Mr. Iwa Kusumasumantri
- 5) Menteri Pekerjaan Umum : Abikusno Cokrosuyoso
- 6) Menteri Kesehatan : dr. Buntaran Martoatmojo
- 7) Menteri Pengajaran : Ki Hajar Dewantara
- 8) Menteri Penerangan : Mr. Amir Syarifuddin
- 9) Menteri Kehakiman : Ir. Surachman Cokrodisuryo
- 10) Menteri Keuangan : Mr. A. A. Maramis
- 11) Menteri Perhubungan : Abikusno Cokrosuyoso

(ad interim)

- 12) Menteri Keamanan Rakyat : Supriyadi

Menteri negara nondepartemen adalah Otto Iskandar di Nata, Mr. R. M. Sartono, dr. M. Amin, dan Wachid Hasyim. Selain itu, ada juga pejabat negara, seperti Mr. A. G. Pringgodigdo (Sekretaris Negara), Mr. Gatot Tarunomiharjo (Jaksa Agung), Mr. dr. Kusumah Atmaja (Ketua Mahkamah Agung). Sukarjo Wiryo Pranoto (Juru Bicara Negara).

b. Pembagian wilayah Indonesia menjadi delapan provinsi beserta penetapan gubernur wilayahnya. Delapan provinsi tersebut meliputi sebagai berikut.

- 1) Sumatra : Mr. Teuku M. Hasan
- 2) Jawa Barat : Mas Sutarjo Kartohadikusumo
- 3) Jawa Tengah : Raden Panji Suroso

- 4) Jawa Timur : Raden Mas Tumenggung Ario Suryo
- 5) Kalimantan (Borneo) : Ir. Mohammad Noor
- 6) Sulawesi : Dr. Sam Ratulangi
- 7) Maluku : Mr. Johannes Latuharhary
- 8) Nusa Tenggara (Sunda Kecil) : Mr. I Gusti Ketut Puja

Sidang III PPKI

Sidang III (terakhir) PPKI diadakan tanggal 22 Agustus 1945 dengan hasilnya sebagai berikut.

- a. Pembentukan Komite Nasional Indonesia Pada awalnya, Komite Nasional Indonesia berfungsi sebagai badan pembantu dan penasihat presiden. Keanggotaannya berasal dari anggota PPKI ditambah tokoh masyarakat lainnya. Ketuanya adalah Kasman Singodimejo.
- b. Penetapan Partai Nasional Indonesia sebagai partai tunggal yang diketuai oleh Ir. Sukarno.
- c. Membentuk Badan Keamanan Rakyat yang kelak berfungsi sebagai tentara nasional Indonesia. BKR terdiri atas kumpulan organisasi militer dan semimiliter yang ada dalam masyarakat, seperti Peta, Seinendan, Keibodan, dan Heiho pada zaman Jepang.

e. Perubahan-perubahan dalam sistem Pemerintah RI di awal kemerdekaan:

Setelah terbentuknya sistem pemerintahan Indonesia hasil sidang PPKI, tampaknya pemerintahan baru Indonesia tidaklah dapat langsung menjalankan roda pemerintahannya dengan lancar. Situasi dan kondisi politik internasional yang masih dipengaruhi pascaberakhirnya Perang Dunia II dengan kemenangan Sekutu tampaknya memengaruhi kehidupan politik Indonesia. Beberapa tokoh nasional berpendapat perlu adanya perubahan dalam sistem pemerintahan sesuai kehidupan politik saat itu.

1. Penambahan fungsi KNIP sebagai badan legislatif

Pada 16 Oktober 1945, dikeluarkan Maklumat Wakil Presiden No. X yang berisi keputusan agar KNIP diberi kekuasaan legislatif dan menentukan garis-garis besar haluan negara sebelum adanya MPR dan DPR. Selain itu, diputuskan adanya Badan

Pekerja KNIP apabila terjadi keadaan darurat dan Badan Pekerja KNIP ini akan bertanggung jawab kepada KNIP.

2. Perubahan sistem pemerintahan presidensial ke parlementer

Perubahan sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem parlementer Pada 3 November 1945, dikeluarkan Maklumat No. X tentang pembentukan partai-partai politik. Dengan demikian, PNI yang semula ditetapkan sebagai partai tunggal menjadi batal. Salah satu alasan dikeluarkannya maklumat tersebut adalah untuk menunjukkan Indonesia adalah negara demokrasi. Adapun partai-partai politik yang terbentuk sejak dikeluarkannya maklumat tersebut sebagai berikut.

- a) Masyumi yang dipimpin oleh dr. Sukiman Wiryosanjoyo, berdiri pada 7 November 1945.
- b) PKI yang dipimpin oleh Mr. M. Yusuf, berdiri pada 7 November 1945.
- c) PBI (Partai Buruh Indonesia) dipimpin Nyono, berdiri pada 8 November 1945.
- d) Partai Rakyat Jelata dipimpin oleh Sutan Dewanis, berdiri pada 8 November 1945.
- e) Parkindo (Partai Kristen Indonesia) dipimpin Dr. Prabowinoto, berdin pada 10 November 1945.
- f) PSI (Partai Sosialis Indonesia) dipimpin Amir Syarifuddin, berdiri pada 10 November 1945.
- g) PRS (Partai Rakyat Sosialis) dipimpin Sutan Syahrir, berdiri pada 10 November 1945.
- h) PKRI (Partai Katolik Republik Indonesia) dipimpin I. J. Kasimo, berdiri pada 8 Desember 1945.

3. Pembentukan kabinet parlementer

Pada 14 November 1945, dikeluarkan maklumat pemerintah tentang persetujuan usul Badan Pekerja KNIP bahwa para menteri akan bertanggung jawab kepada badan perwakilan rakyat. Hal ini menunjukkan adanya perubahan dalam sistem pemerintahan, dari yang semula sistem presidensial, yaitu para menteri bertanggung jawab kepada presiden, menjadi sistem parlementer, yaitu para menteri bertanggung jawab kepada parlemen.

4. Pemilihan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan

Setelah sistem pemerintahan berganti menjadi sistem parlementer, kepala pemerintahan pun akan dipegang oleh perdana menteri. KNIP segera mengadakan sidang untuk menunjuk perdana menteri pertama Indonesia. Adapun tokoh yang terpilih sebagai perdana menteri pertama Indonesia adalah Sutan Syahrir. Ia adalah tokoh nasionalis yang selama masa pendudukan Jepang tidak pernah mau bekerja sama sehingga tidak dianggap sebagai kolaborator Jepang. Indonesia yang ingin menarik simpati dan pengakuan dunia internasional untuk kemerdekaannya sengaja memilih Sutan Syahrir karena dianggap mampu menghapus pandangan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah pemberian Jepang.

5. Pembentukan Tentara Nasional Indonesia

a) Ketika kekuatan asing semakin banyak memasuki Negara Indonesia merdeka, banyak pemuda yang membentuk laskar bersenjata karena tidak adanya wadah tentara nasional, seperti Hizbullah dan Angkatan Pemuda Indonesia. Kekuatan Jepang yang masih ada, ditambah dengan kedatangan pasukan AFNEI (Allied Forces Netherland Indies) pada 16 September 1945 dan NICA (Netherlands Indies Civil Administration) yang mengikuti pasukan Sekutu pada 29 September 1945 semakin mengkhawatirkan negara Indonesia yang baru berdiri karena tidak memiliki tentara nasional untuk menjaga kemerdekaannya. Presiden Sukarno akhirnya memutuskan membentuk Tentara Keamanan Rakyat melalui Maklumat Pemerintah 5 Oktober 1945.

b) Pada 1 Januari 1946, dikeluarkan Penetapan Pemerintah No. 2/ SD 1946 tentang perubahan nama Tentara Keamanan Rakyat menjadi Tentara Republik Indonesia. Pergantian ini ternyata belum diikuti dengan perubahan dalam struktur organisasi TRI itu sendiri. Beberapa laskar rakyat masih belum menjadi anggota TRI. Hal ini dianggap melemahkan kekuatan bangsa ini untuk mempertahankan diri. Pemerintah pun merencanakan membentuk satu kesatuan yang sifatnya nasional meliputi seluruh organisasi pertahanan keamanan yang ada dalam masyarakat.

c) Pada 5 Mei 1947, presiden mengeluarkan dekrit tentang Panitia Pembentukan Organisasi Tentara Nasional Indonesia. Pada 3 Juni 1947, pemerintah mengumumkan secara resmi pembentukan Tentara Nasional Indonesia yang menjadi wadah semua kekuatan bersenjata di masyarakat.

***_Yakinlah pada kemampuan diri sendiri,
Moga Sukses dan jadi Juara_***